

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implemenatasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing.

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat, Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kehasan daerah masing-masing.

Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839), Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Selanjutnya, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi

hak daerah, Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan yaitu pemerintah daerah, Pemerintah daerah

bebas berkreasi dan bereksperi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

Dengan adanya otonomi daerah membuat pemerintah daerah akan lebih leluasa membelanjakan penerimaannya sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah tersebut, sehingga pemerintah memiliki wewenang untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di daerahnya secara bijak demi kepentingan masyarakatnya.

Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya otonomi daerah ini adalah untuk mendorong pemerintah daerah melakukan peningkatan dan mengembangkan penerimaan daerahnya dengan mencari sumber-sumber pendapatan yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai belanja daerah sehingga pemerintah daerah itu sendiri dapat mengembangkan pembangunan infrastruktur pemerintahannya itu sendiri berasal dari pajak maupun retribusi tanpa tergantung dari pemerintah pusat.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim merupakan kabupaten yang memiliki Pendapatan Asli Daerah yang dari tahun ketahun mengalami peningkatan, walaupun demikian, terkadang realisasi penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah tersebut tidak mencapai target yang telah dianggarkan, berikut daftar anggaran dan realisasi dari pendapatan asli daerah kabupaten muara enim dalam sepuluh tahun terakhir.

**Tabel 1.1**  
**Anggaran dan Realisasi PAD Kabupaten Muara Enim**  
**Tahun Anggaran 2005-2013**  
**(dalam rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>
2005	31,413,332,221	33,494,774,773
2006	31,257,657,418	40,557,395,855
2007	42,734,016,184	49,759,425,806
2008	51,054,985,616	55,997,586,975
2009	58,990,767,107	67,530,328,351
2010	69,113,701,077	69,689,407,357

2011	80,432,46,504	86,937,486,067
2012	98,591,011,328	119,455,990,186
2013	116,403,670,831	149,060,132,498
2014	138,348,636,341	147,452,708,84
2015	182,898,761,175	

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa pada tahun 2004 Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim tidak dapat mencapai target anggaran yang telah ditetapkan, pada tahun-tahun berikutnya apa yang dianggarkan oleh pemerintah daerah mencapai target yang dianggarkan, dimana pada tahun 2013 anggaran untuk PAD sebesar Rp,116,403,670,831,00 untuk pendapatan asli daerah kabupaten Muara Enim, dengan realisasi untuk tahun 2013 sebesar 149,060,132,498,62 dimana selisih anggaran pada tahun 2013 melampaui anggaran yang telah ditetapkan untuk realisasinya sebesar Rp,32,656,461,670,62, dengan setiap tahun mengalami peningkatan di pos pendapatan asli daerah maka apa yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah tidak mengalami hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah, dan pada tahun 2015 anggaran PAD di Kabupaten Muara Enim sebesar Rp. 182,898,761,175, terlihat adanya peningkatan dari tahun 2014 yang hanya sebesar Rp. 138,348,636,34, dengan realisasi PAD nya sebesar Rp. 147,452,708,84.

Dari data yang didapat dari UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, untuk retribusi parkir di tepi jalan umum, parkir di wilayah kecamatan muara enim untuk bulan Desember memperoleh retribusi parkir sebesar Rp,9,000,000,00 dan untuk wilayah kecamatan Tanjung Enim retribusi parkir nya sebesar Rp,4,000,000,00 dan untuk wilayah kecamatan Talang Ubi retribusi parkir nya sebesar Rp,3,000,000,00, Pungutan retribusi ini untuk bulan Desember tahun 2013, sedangkan untuk tahun 2012 untuk ketiga wilayah tersebut Rp,8,000,000,00 untuk kecamatan Muara Enim, Rp,4,000,000,00 untuk wilayah kecamatan Tanjung Enim dan Rp,3,000,000,00 untuk wilayah Talang ubi, Menurut sumber ini adalah wilayah yang terbesar untuk pemungutan retribusi parkir untuk Kabupaten Muara Enim.

Wahyu Mustajab, 2016

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Misalnya untuk di kecamatan Muara Enim saja memiliki titik parkir sebanyak 29 titik parkir yang diatur oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, yang menurut penulis memiliki potensi yang lebih besar.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir Dinas Perhubungan Muara Enim berikut target dan realisasi penerimaan retribusi Kabupaten Muara Enim selama sepuluh tahun terakhir.

**Tabel 1.2**  
**Target dan Realisasi Pedapatan Retribusi Parkir**  
**Tahun 2004 – 2013**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi			
		Jumlah (Rp)	%	Selisih	%
2005	Rp.25,500,000	Rp.8,196,000	32,14	Rp.(17,304,000,00)	(67,86)
2006	Rp.42,200,000	Rp.50,355,000	119,32	Rp.8,155,000,00	19,32
2007	Rp.843,000,000	Rp.61,130,000	7,25	Rp.(781,870,000,00)	(92,75)
2008	Rp.60,000,000	Rp.59,670,000	99,45	Rp.(330,000,00)	0,55
2009	Rp.75,000,000	Rp.56,400,000	75,20	Rp.(18,600,000,00)	(24,8)
2010	Rp.75,000,000	Rp.78,900,000	105,20	Rp.3,900,000,00	5,20
2011	Rp.75,000,000	Rp.118,600,000	158,20	Rp.43,600,000,00	58,20
2012	Rp.75,000,000	Rp.153,700,000	204,93	Rp.78,700,000,00	104,93
2013	Rp.171,000,000	Rp.190,000,000	111,32	Rp.19,000,000,00	11,32
2014	Rp.183,958,000	Rp.215,678,000	117,24	Rp.31,720,000	17,24
2015	Rp.156,000,000				

Sumber : UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim

Dari data yang didapat dari UPTD Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim menunjukkan pada tahun 2007 target penerimaan parkirnya sebesar Rp,843,000,000,00 akan tetapi realisasinya sebesar 61,130,000,00 dengan demikian dari data sepuluh tahun terakhir tahun 2007 tidak tercapai targetnya begitu besar, yaitu sebesar 92,75%, Sedangkan untuk tahun 2012 melampaui target sebesar Rp,75,000,000,00 dan yang terealisasi sebesar Rp,153,700,000,00 dengan persentase keberhasilan pencapaian target yaitu sebesar 104,93%. Pada tahun 2015 ada nya penurunan target penerimaan retribusi parkir dari

Wahyu Mustajab, 2016

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Rp.183,958,000 menjadi Rp.156,000,000. Dikarenakan tahun 2015 belum selesai, maka untuk realisasinya belum diketahui.

Dari data yang ada, kecenderungan penetapan target penerimaan retribusi parkir tidak ada peningkatan misalnya dari tahun 2009 sampai 2012 sebesar Rp.75,000,000,00, Padahal dari tahun 2009 sampai 2012 hanya tahun 2009 yang tidak mencapai target, sedangkan tahun 2010 sampai tahun 2012 penerimaan retribusi parkir melampaui target.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim nomor 11 tahun 2010 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, penulis hanya diberi jumlah titik-titik parkir di 2 kecamatan yang besar saja yang biasa memungut retribusi parkir yaitu kecamatan Muara Enim dan Kecamatan Tanjung enim, untuk kedua wilayah tersebut memiliki 50 titik parkir, dimana untuk setiap titik parkir itu terdiri dari 2 juru parkir, Mereka berada di bawah pengawasan Unit Pelaksanaan Teknik Dinas Parkir pada Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, Dari semua titik parkir di Kabupaten Muara Enim tentu penerimaan retribusi parkir pun diharapkan melebihi target, namun pada kenyataannya, justru banyak target yang tidak sesuai untuk dijadikan Patokan penerimaan retribusi parkir, dimana menurut penulis bisa melebihi realisasi nya pertahun.

## **B. Identifikasi Masalah Penelitian**

Otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kemandirian daerah dalam pengelolaan segala sumber daya daerah dengan mengutamakan kepentingan publik, mewujudkan kemandirian keuangan daerah, pemerintah harus meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor, yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD), Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat, sehingga dapat meningkatkan otonomi dan keuangan daerah.

Otonomi daerah adalah pemberian wewenang yang lebih luas kepada daerah dalam mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri, Berkaitan dengan hal

tersebut peran pemerintah dalam mengelola keuangan daerah sangat menentukan berhasil tidaknya dalam menciptakan kemandirian keuangan daerah.

Menurut Halim (2004:232) “kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah”.

Terkait dengan kemandirian keuangan daerah, PAD harus bisa dioptimalkan melalui penggalan potensi sumber-sumbernya.

Menurut Halim, (2004:105) menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan dari daerah yang perlu ditingkatkan, sehingga kemandirian dan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab dapat terlaksana”.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiaya kegiatan rutin maupun pembangunan, Pendapatan asli daerah dapat dikaitkan sebagai pendapatan rutin dari seluruh usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya, Menurut Peraturan Daerah No,58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari :

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan tulang punggung dalam pembiayaan daerah, karena itu, kemampuan pemerintah daerah dalam menggali semua potensi PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut, Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar PAD.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, Yang membedakan antara pajak daerah dengan retribusi daerah adalah balas jasa yang diterima, jika pada pajak masyarakat tidak dapat secara langsung merasakan balas

jasanya, maka pada retribusi masyarakat dapat secara langsung merasakan kontraprestasi (balas jasa) yang diberikan oleh pemerintah.

Menurut Marihot P, Siahaan (2010:37) “retribusi merupakan pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan,” karena merupakan pembayaran wajib maka siapa saja yang menikmati pelayanan dari fasilitas yang diberikan Negara haruslah membayar retribusi, jasa yang diberikan negara tersebut dapat dikatakan langsung, yaitu hanya membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara tersebut dan dikenakan perorangan.

Salah satu yang terdapat di retribusi daerah adalah retribusi parkir dimana retribusi parkir merupakan penerimaan daerah dari pendapatan asli daerah yang berkontribusi dalam penerimaan pendapatan asli daerah.

Kendaraan sebagai sarana transportasi tentu membutuhkan ruang untuk parkir, baik di garasi mobil, gedung parkir, halaman, maupun di tepi jalan umum, Yang tergolong dalam retribusi parkir adalah retribusi parkir tepi jalan umum, Dimana yang melaksanakan pemungutan terhadap retribusi parkir adalah pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR DAN KONTRIBUSINYA PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH” (Studi Kasus Pada Kabupaten Muara Enim)**

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana potensi retribusi parkir di kabupaten muara enim
2. Bagaimana efektivitas retribusi parkir di Kabupaten Muara Enim berdasarkan target
3. Bagaimana efektivitas retribusi parkir di Kabupaten Muara Enim berdasarkan potensi



4. Bagaimana kontribusi retribusi parkir terhadap PAD di Kabupaten Muara Enim
5. Upaya apa yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir terhadap PAD

#### **D. Maksud Dan Tujuan Penelitian**

##### **1. Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data atau informasi mengenai retribusi parkir, menganalisis efektivitas retribusi parkir dan kontribusi dari retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muara Enim.

Serta untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan bagi penulisan penelitian sebagai salah satu syarat dalam menempuh gelar sarjana pendidikan, fakultas pendidikan ekonomi dan bisnis, jurusan pendidikan akuntansi, di universitas pendidikan Indonesia.

##### **2. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai dengan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Menganalisis potensi retribusi parkir di Kabupaten Muara Enim.
2. Menganalisis efektivitas retribusi parkir di Kabupaten Muara Enim berdasarkan target yang ada.
3. Menganalisis efektivitas retribusi parkir di Kabupaten Muara Enim berdasarkan potensi yang ada.
4. Menganalisis kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Muara Enim.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Merujuk pada maksud dan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini sekurang-kurangnya diharapkan dapat memberikan dua kegunaan, yaitu :

## 1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperluas pengetahuan mengenai akuntansi sektor public dan akuntansi sektor pajak dalam hal ini yaitu ilmu pemerintahan mengenai pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim khususnya mengenai kontribusi retribusi parkir dalam menunjang pendapatan asli daerah terhadap kemandirian daerah berdasarkan retribusi parkir di wilayah Kabupaten Muara Enim.

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep atau teori dan memberi sumbangan pemikiran yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan mengenai retribusi daerah, khususnya mengenai retribusi parkir, Serta memperkaya tentang ilmu pengetahuan tentang pemerintahan daerah, yang semakin hari semakin berkembang pesat, Karena sangat bermanfaat untuk mempermudah kita dalam proses pembelajarannya.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi pemerintah daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan membantu pemerintah daerah dalam mengambil keputusan terutama yang berkaitan dengan PAD melalui retribusi parkir yang termasuk retribusi daerah guna mewujudkan kemandirian keuangan daerah.

### b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana keuangan daerah itu dikelola untuk dapat meningkatkan PAD sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

### c. Bagi peneliti

Penelitian ini akan menambah pengetahuan yang berharga dari dunia praktis dan merupakan salah satu upaya peningkatan kemampuan analisis yang dipelajari selama ini dan sebagai syarat untuk dapat lulus serta mendapat gelar Sarjana Strata-1 Pendidikan Akuntansi, Manfaat bagi dunia pendidikan adalah penulis dan pembaca dapat sama-sama mengetahui lebih jauh perkembangan PAD terhadap kemandirian

keuangan daerah yang terbaru, Selain itu penulis dan pembaca juga dapat mengevaluasi pengetahuan yang diberikan selama menuntut ilmu di bangku kuliah sehingga dapat memberikan masukan teori secara lebih luas.